

## FORMULIR 1 PERMOHONAN PENDAFTARAN PENYELENGGARA

Nomor : ..... , ..... 20

...

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan Pendaftaran Penyelenggaraan  
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah\*)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bersama ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Penyelenggara atas nama PT/Koperasi \*\*)/\*\*\*) .....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/ditetapkan oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
  1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  2. anggota Direksi; dan
  3. anggota Komisaris;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
- d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
- e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional;
- f. bukti pemenuhan syarat permodalan; dan
- g. Surat Pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Direksi PT/Koperasi\*\*)/\*\*\*) .....

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*\*) Sebutkan

## FORMAT 2 PERMOHONAN PERIZINAN PENYELENGGARA

Nomor : ..... , ..... 20 ...  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Perizinan Penyelenggaraan  
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah\*)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.01/2016  
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,  
bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha  
sebagai Penyelenggara:

Nama Pemohon : .....  
Jabatan Pemohon : .....  
Alamat Pemohon : .....  
Kota ..... Kode Pos .....  
Provinsi .....  
Nomor Telepon Pemohon : .....  
Nomor Telepon Seluler Pemohon : .....  
Email Pemohon : .....  
Nama Perusahaan : PT/Koperasi\*\*)/\*\*\*) .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
No. Telepon/Fax Perusahaan : .....  
Alamat Website Perusahaan : .....  
Email Perusahaan : .....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan  
dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut  
perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang  
berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang  
paling sedikit memuat:
  1. nama dan tempat kedudukan;
  2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang  
Berbasis Teknologi Informasi;
  3. permodalan;
  4. kepemilikan;
  5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris; dan

6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.
- b. daftar kepemilikan, berupa:
- 1) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum berbentuk perseroan terbatas; atau
  - 2) daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi badan hukum berbentuk koperasi.
- c. data pemegang saham:
- 1) Bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:
    - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
    - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
    - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
    - d) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
      - 1) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
      - 2) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
      - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
      - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
      - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
      - 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
      - 7) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan Komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
  - 2) Bagi badan hukum, dilampiri dengan:
    - a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;
    - b) surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:

- i. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
    - ii. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan
    - iii. tidak tercatat dalam daftar kredit macet.
  - 3) Bagi Pemerintah Pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan.
  - 4) Bagi Pemerintah Daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan.
- d. data direksi dan komisaris:
  - 1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
  - 2) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
  - 3) fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  - 4) surat pernyataan bermeterai dari masing-masing Direksi, dan Komisaris yang menyatakan:
    - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
    - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
    - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- e. fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama Penyelenggara pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
- f. struktur organisasi Penyelenggara;
- g. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
  1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;

2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
  3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan.
- i. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
    1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Penyelenggara, atau perjanjian sewa gedung/ruangan; dan
    2. daftar inventaris dan peralatan kantor.
  - j. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;
  - k. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
  - l. bukti pelunasan biaya perizinan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Direksi PT/Koperasi\*\*)/\*\*\*) .....

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*\*) Sebutkan

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Data Pribadi

1. Nama : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Agama : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Alamat Lengkap : .....  
Kota : ..... Kode Pos : .....  
Provinsi: .....
7. Nomor Telepon : .....
8. Nomor Telpon Seluler : .....
9. Izin Orang Perseorangan yang dimiliki : 1) .....  
2) .....

#### Riwayat Pendidikan

##### 1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/ Spesialisasi	Nama/ Tempat	Tahun Lulus

##### 2. Non Formal (Bersertifikat)

Kursus/Seminar	Penyelenggara	Tahun

##### 3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

#### Riwayat Pendidikan

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja	Alasan Keluar

....., ..... 20 ...  
Pemohon,

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

## LAPORAN BUKTI KESIAPAN OPERASIONAL KEGIATAN USAHA

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah\*)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bersama ini kami melaporkan bahwa PT/Koperasi \*\*)/\*\*\*) ..... telah memulai kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada tanggal .....

Sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami sampaikan:

1. Dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara; dan
2. Data kegiatan operasional.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*, kami mengucapkan terima kasih.

....., ..... 20 ...  
Direksi PT/Koperasi\*\*)/\*\*\*) .....

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*\*) Sebutkan

**SURAT PERNYATAAN RENCANA PENYELESAIAN TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA DALAM HAL PERIZINAN PENYELENGGARAAN TIDAK DISETUJUI OLEH OJK**

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah\*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Kota ..... Kode Pos .....  
Provinsi .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Alamat *Website* Perusahaan : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia melaksanakan penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan penyelenggaraan tidak disetujui OJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., ..... 20 ...  
Direksi PT/Koperasi\*\*)/\*\*\*) .....

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*\*) Sebutkan

**SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN**

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah\*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Kota ..... Kode Pos .....  
Provinsi .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Alamat *Website* Perusahaan : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
2. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
3. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
7. tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan Komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., ..... 20 ...

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

**SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM**

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah\*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Kota ..... Kode Pos .....  
Provinsi .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Alamat *Website* Perusahaan : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
2. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan
3. tidak tercatat dalam daftar kredit macet.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., ..... 20 ...  
Direksi PT/Koperasi\*\*)/\*\*\*)  
.....

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah\*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Kota ..... Kode Pos .....  
Provinsi .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Alamat *Website* Perusahaan : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., ..... 20 ...  
Direksi PT/Koperasi\*\*)/\*\*\*) .....

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

### SURAT PERNYATAAN KOMISARIS

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah\*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Kota ..... Kode Pos .....  
Provinsi .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Alamat *Website* Perusahaan : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., ..... 20 ...  
Komisaris PT/Koperasi\*\*)/\*\*\*)  
.....

*Meterai*  
*Rp.6000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

### **FORMULIR 3 LAPORAN BULANAN**

Sistematika Laporan Bulanan, terdiri dari:

HALAMAN JUDUL

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. KINERJA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
2. KINERJA KEUANGAN PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
  - 2.1 Laporan Posisi Keuangan
  - 2.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

**Formulir 3-A** Laporan kinerja keuangan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik

**Formulir 3-B** Laporan kinerja penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik

**Formulir 3-C** Dokumen elektronik dalam format *database* dengan struktur elemen *database* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi











## FORMULIR 4 LAPORAN TAHUNAN

Sistematika Laporan Tahunan, terdiri dari:

<b>Uraian</b>	<b>Penjelasan</b>
HALAMAN JUDUL	Halaman depan laporan yang berisi judul dari laporan tahunan
RINGKASAN EKSEKUTIF	Rangkuman dari isi laporan tahunan
1. KILAS KINERJA	Gambaran umum mengenai kinerja penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ditinjau dari aspek kinerja keuangan dan kegiatan penyelenggara selama 3 tahun berturut-turut (jika data 2 tahun sebelumnya telah tersedia)
1.1. Ikhtisar Keuangan	Laporan kinerja keuangan penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
1.1.1 Laporan Laba Rugi	Laporan kinerja laba rugi yang antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah Pendapatan Usaha</li><li>• Jumlah Beban Usaha</li><li>• Beban (Pendapatan) Usaha Lainnya</li><li>• Laba (Rugi) Usaha</li><li>• Laba (Rugi) Sebelum Pajak</li><li>• Manfaat (Beban) Pajak</li><li>• Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan</li><li>• Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik</li><li>• Laba (Rugi) Per Saham Dasar</li></ul>
1.1.2 Laporan Posisi Keuangan	Laporan kinerja laba rugi yang antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Aset dan liabilitas<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah aset lancar</li><li>- Jumlah aset tidak lancar</li><li>- Jumlah aset</li><li>- Liabilitas jangka panjang</li><li>- Liabilitas jangka pendek</li></ul></li><li>• Ekuitas<ul style="list-style-type: none"><li>- Modal ditempatkan dan disetor</li><li>- Tambahan modal disetor</li><li>- Saldo laba</li></ul></li></ul>
1.1.3 Laporan Arus Kas	Laporan arus kas yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Arus kas dari kegiatan operasi</li><li>• Arus kas dari kegiatan investasi</li><li>• Arus kas dari kegiatan pembiayaan</li></ul>

1.1.4 Rasio Keuangan	Rasio keuangan antara lain yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• timbal hasil rata-rata aset</li> <li>• timbal hasil rata-rata ekuitas</li> <li>• rasio lancar</li> <li>• rasio total hutang terhadap ekuitas</li> <li>• rasio total hutang terhadap aset</li> <li>• margin laba usaha</li> <li>• margin laba bersih</li> <li>• margin ebitdar</li> </ul>
1.2. Ikhtisar Operasional	Laporan kinerja penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• status permohonan pinjaman dalam satu tahun yang meliputi: jumlah orang, jumlah uang, rata-rata tertimbang bunga, dan rata-rata tertimbang tenor</li> <li>• status persetujuan pinjaman dalam satu tahun yang meliputi: jumlah orang, jumlah uang, rata-rata tertimbang bunga, rata-rata tertimbang tenor, rata-rata status lancar, rata-rata status tidak lancar, dan rata-rata NPL</li> <li>• status akumulasi pinjaman dalam satu tahun yang meliputi: jumlah orang, jumlah uang, rata-rata tertimbang bunga, rata-rata tertimbang tenor, rata-rata status lancar, rata-rata status tidak lancar, dan rata-rata NPL</li> </ul>
1.3. Testimoni Pelanggan dan Mitra Bisnis	Rangkuman testimoni dari pengguna jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
1.4. Penghargaan dan Sertifikasi	Uraian mengenai penghargaan dan sertifikasi yang telah diperoleh
<b>2. LAPORAN MANAJEMEN</b>	Laporan umum mengenai berbagai kegiatan dan capaian yang telah diperoleh
2.1 Laporan Dewan Komisaris	Laporan umum yang disampaikan oleh dewan komisaris
2.2 Profil Dewan Komisaris	Profil dewan komisaris
2.3 Laporan Direksi	Laporan umum yang disampaikan oleh direksi
2.4 Profil Direksi	Profil direksi
<b>3. PROFIL PERUSAHAAN</b>	Uraian mengenai profil perusahaan
3.1 Identitas Penyelenggara	Uraian mengenai identitas penyelenggara
3.2 Visi, Misi, dan Kerangka Nilai	Uraian mengenai visi, misi, dan kerangka nilai
3.3 Sekilas Penyelenggara	Uraian mengenai penyelenggara, jejak langkah, bidang usaha, struktur organisasi, dan peristiwa penting dalam satu tahun

3.4 Jejak Langkah	
3.5 Bidang Usaha	
3.6 Struktur Organisasi	
3.7 Struktur Grup	
3.8 Peristiwa Penting dalam satu tahun	
4. TINJAUAN UNIT PENDUKUNG BISNIS	Uraian mengenai strategi dan pengembangan unit pendukung bisnis
4.1. Sumber Daya Manusia	Uraian mengenai strategi dan pengembangan Sumber daya manusia
4.2. Teknologi Informasi	Uraian mengenai strategi dan pengembangan teknologi informasi
5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	Merupakan bagian yang menguraikan analisis dan pembahasan manajemen yang berhubungan dengan masa depan dan kelanjutan usaha
5.1. Tinjauan Makro Ekonomi	Uraian pemahaman manajemen mengenai kondisi makro perekonomian sebagai lingkungan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan
5.2. Tinjauan Industri	Uraian manajemen mengenai perkembangan industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
5.3. Tinjauan Bisnis	Uraian manajemen mengenai peluang, tantangan, dan potensi risiko bagi kelanjutan usaha dari penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
5.4. Tinjauan Keuangan	Uraian manajemen mengenai dampak dari manajemen makro ekonomi, industri, dan persaingan bisnis terhadap kinerja keuangan dari penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
5.5. Aspek Pemasaran	Uraian manajemen mengenai strategi dan pengembangan pemasaran untuk kelangsungan usaha
5.6. Prospek Bisnis dan Strategi Tahun Depan	Uraian manajemen mengenai prospek dan rencana pengembangan bisnis pada tahun-tahun mendatang
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN	Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai penerapan tata kelola perusahaan
6.1. Manajemen Risiko	Uraian mengenai penerapan manajemen risiko
6.2. Sistem Pengendalian Internal	Uraian mengenai penerapan sistem pengendalian internal
6.3. Perkara Penting dan Sanksi Administratif	Uraian mengenai kejadian perkara penting dan sanksi administratif

6.4. Kode Etik dan Budaya Perusahaan	Uraian mengenai kode etik dan budaya perusahaan beserta penerapannya
6.5. Sistem Pelaporan Pelanggaran	Uraian mengenai penerapan sistem pelaporan pelanggaran
6.6 Keterbukaan Informasi	
7. INFORMASI TAMBAHAN	Uraian mengenai penerapan keterbukaan informasi
7.1. Pejabat Senior	Uraian mengenai informasi pejabat senior
7.2. Program Kerja Sama	Uraian mengenai pengembangan kerjasama penyelenggara dengan pihak-pihak lain
7.3. Kantor Cabang	Uraian mengenai pengembangan kantor cabang
8. PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN	Halaman yang berisi mengenai pernyataan pertanggung jawaban dari dewan komisaris terhadap pembuatan laporan tahunan
9. LAPORAN KEUANGAN	Halaman berisi mengenai laporan keuangan penyelenggara secara lengkap sejak 3 tahun terakhir (jika laporan keuangan 2 tahun terakhir telah tersedia)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

MULIAMAN D.HADAD

Yuliana